



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK KELITBANGAN
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,

- Menimbang** : bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E No. 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 11);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Rencana Induk Kelitbangan yang selanjutnya disingkat RIK adalah Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang disusun setiap tahun sekali.
7. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017–2022.

BAB II

RENCANA INDUK KELITBANGAN

Pasal 2

RIK merupakan dokumen perencanaan kelitbangan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Pasal 3

Sistematika RIK disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Proyeksi Kebutuhan Pembangunan Daerah
- BAB III : Agenda Strategi Kelitbangan
- BAB IV : Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan
- BAB V : Penutup

Pasal 4

RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RIK wajib dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD dan menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra OPD serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan selama kurun waktu tahun 2017–2022.

Pasal 6

RIK wajib dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kelitbangan di Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RIK.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RIK dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 68

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA INDUK KELITBANGAN
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.

Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah sebagai update/ pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Mendasarkan pada regulasi tersebut diatas, pada pasal 9 mengamanatkan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja Kelitbangan dimana Rencana Kerja Kelitbangan tersebut terdiri dari Rencana Induk Kelitbangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 68

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.

Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah sebagai update/pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Mendasarkan pada regulasi tersebut di atas, pada pasal 9 mengamanatkan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja Kelitbangan di mana Rencana Kerja Kelitbangan tersebut terdiri dari a) Rencana Induk Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan b) Rencana Kerja Tahunan di mana Rencana Kerja Kelitbangan tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain: a) kebijakan dan program terkait; b) metode; c) waktu; d) lokasi; e) kelembagaan; f) sumberdaya manusia aparatur; g) sarana prasarana; h) fasilitas pendukung; dan i) pembiayaan.

Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang

akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sementara tujuannya adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD), sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang, sehingga Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang perlu untuk menyusun Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagai dokumen yang memuat arah kebijakan kelitbangan serta strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Batang.

BAB II

PROYEKSI KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DAERAH

II.1. ELABORASI SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 harus sejalan dan memberikan arah serta mendukung pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, di mana saat ini dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 masih dalam proses penyusunan, sehingga sasaran pembangunan daerah mengacu pada Visi Misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Batang terpilih, di mana Visi Bupati dan Wakil Bupati Batang Terpilih Periode 2017-2022 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Batang Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram dan Sejahtera Pada Tahun 2022"**.

Makna yang terkandung di dalam Visi *Batang Yang Harmonis* adalah pemerintahan berjalan selaras dengan aspirasi masyarakat; merangkul dan mengajak seluruh pegawai; pembangunan Batang yang selaras dengan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jateng; menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) sehingga terciptanya harmoni dengan alam; membangun kerjasama produktif bersama TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri, dan seluruh instansi vertikal lainnya; dan menjalin kerjasama yang baik dengan daerah sekitar.

Makna yang terkandung di dalam Visi *Batang Yang Energik* adalah seluruh *stakeholder* yang ada bersemangat untuk membangun Batang; fokus pada pembangunan manusia Batang seutuhnya; ketersediaan layanan kesehatan prima dan paripurna di Batang; pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh penduduk Batang; pengembangan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal Batang; stimulus bagi masyarakat untuk mengolah seluruh potensi yang ada sehingga bernilai ekonomi tinggi dan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat; serta Kabupaten Batang pro investasi.

Makna yang terkandung di dalam Visi *Batang Yang Berdaya Saing* adalah Batang terus tumbuh dan berkembang mengungguli daerah lain; terwujudnya desa pintar (*smart village*); dan integrasi pengembangan agrobisnis dan pariwisata (*edu tourism and religi tourism*).

Makna yang terkandung di dalam Visi *Batang Yang Agamis* adalah terwujudnya masyarakat Batang yang taat mengamalkan ajaran agamanya masing-masing; pemerintah daerah menjamin kebebasan seluruh masyarakat untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan agamanya dengan tertib; serta pemerintah daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pengamalan keagamaan secara proporsional.

Makna yang terkandung di dalam Visi *Batang Yang Tenteram* adalah kehidupan masyarakat Batang damai, aman tenteram dan sentosa; terciptanya kerukunan seluruh masyarakat; angka kriminalitas yang terus turun; dan rasa tentram dari kemungkinan terjadinya bencana.

Makna yang terkandung di dalam Visi *Batang Yang Sejahtera* adalah masyarakat Batang sejahtera lahir batin; meningkatnya *income per capita* penduduk Batang dari tahun ke tahun, meningkatnya daya beli keluarga (atas sandang, pangan dan papan); terpenuhinya hak atas pendidikan, terpenuhinya hak atas kesehatan dan terfasilitasinya kebutuhan aktualisasi diri setiap penduduk Batang; dan terbukanya ruang publik baru untuk masyarakat Batang dapat mengaktualisasikan dirinya.

Jika merujuk pada dokumen pencalonan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017-2022 maka telah termuat Misi Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebanyak 19 (sembilan belas) misi yaitu:

1. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*);
2. Meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing;
3. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah sekitar, dan seluruh instansi vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Batang;
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara holistik;
5. Memastikan penduduk usia pendidikan dasar bersekolah dengan gratis dan penduduk usia menengah bersekolah dengan biaya terjangkau;

6. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan pendidikan vokasional berbasis potensi lokal Batang dengan mendirikan SMK baru dengan jurusan: a) pengolahan produk perikanan; b) pengolahan produk pertanian dan Perkebunan; c) teknik ukir dan mebel; dan d) pengolahan kulit dan produk turunannya;
7. Meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya pemuda untuk mengolah dan mengelola potensi (komoditas maupun lokasi) yang tersedia di desa masing-masing dengan skema industri kreatif;
8. Membuka peluang investasi dengan mempromosikan ketersediaan lahan, energi dan tenaga kerja untuk industri dan manufaktur;
9. Menuntaskan pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat dan tepat;
10. Membangun ketahanan pangan dengan menguatkan sektor pertanian dan peternakan;
11. Melakukan penataan pengelolaan kawasan pesisir Batang;
12. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan kredit produktif;
13. Membangun sistem distribusi dan pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat Batang;
14. Mengimplementasikan konsep desa pintar (*smart village*) secara bertahap untuk 248 desa / kelurahan yang ada;
15. Mengembangkan dan mengintegrasikan agro bisnis dan agro wisata di wilayah Batang;
16. Mengembangkan objek wisata religi, wisata edukasi dan merevitalisasi objek wisata yang ada namun tak terawat;
17. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pengamalan agama kepada seluruh umat beragama;
18. Membangkitkan kembali sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi dalam bentuk sistem peringatan dini dan pelaporan tindakan kriminal bersama Kepolisian yang ada di Kabupaten Batang; dan
19. Meningkatkan pendapatan dan daya beli melalui penguatan ekonomi masyarakat serta membuka dan menyediakan ruang publik bagi masyarakat Batang.

Merujuk pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 bahwa rumusan misi Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 tersebut di atas perlu untuk di-*reformulasi* dengan beberapa pertimbangan di mana misi secara konsep harus terkait dengan fungsi utama dalam hal ini harus bisa memayungi semua aspek yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang secara lebih umum; Misi tersebut di-*reformulasi* dengan tidak menghilangkan rumusan misi lama, reformulasi misi dilakukan untuk memudahkan dalam manajemen perencanaan program pembangunan serta evaluasi pembangunan daerah, di mana rumusan misi baru mengeliminir "tumpang tindih" urusan yang melekat pada misi, sehingga lebih jelas dan optimal dalam pencapaian visi yang ditetapkan serta perangkat daerah yang mengampu pencapaian visi dan misi tersebut.

Sehingga berdasarkan rumusan dan pertimbangan di atas, maka reformulasi Misi Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *e government* didukung pengembangan kerjasama.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.
3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan.
4. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

Berdasarkan rumusan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017-2022 tersebut di atas maka jelas terlihat bahwa misi pembangunan Batang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung pembangunan Kelitbangan Kabupaten Batang.

Untuk merumuskan dan menterjemahkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017-2022 tersebut ke dalam agenda kelitbangan daerah maka perlu untuk mengkaji dan mengelompokkan ke dalam agenda strategis kelitbangan daerah sesuai dengan amanat regulasi yaitu 1) Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 2) Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan; 3) Program

Prioritas Bidang Ekonomi ; 4) Program Prioritas Bidang Infrastruktur; dan 5) Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek.

II.2. AGENDA STRATEGIS KELITBANGAN DAERAH

Agenda Strategis Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 selain mengacu pada Visi Misi Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang tercermin dari permasalahan yang masih dihadapi daerah, baik permasalahan pada urusan wajib, urusan pilihan dan penunjang, yang kemudian mengerucut menjadi isu-isu strategis Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

Adapun isu-isu strategis Kabupaten Batang yang termuat dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 yaitu:

1. Masih rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Batang ditunjukkan dengan angka IPM pada tahun 2016 yang baru mencapai 66,38 yang berada pada posisi enam terendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batang yang mendukung aksesibilitas masyarakat dan menunjang berjalannya pengembangan perekonomian yang berkelanjutan;
4. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi (*E-Government*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang sebagai langkah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pelayanan publik dan penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi;
5. Belum optimalnya upaya dalam mendukung pengelolaan potensi lokal daerah melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu;
6. Masih kurangnya upaya yang berkesinambungan dalam mendorong tumbuhnya industri kreatif di Kabupaten Batang;

7. Masih minimnya pembinaan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur di Kabupaten Batang dalam rangka mendukung peningkatan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah).

Berdasarkan 7 (tujuh) isu-isu strategis tersebut maka disusunlah beberapa agenda strategis kelitbangan dengan mengacu pada pedoman penyusunan kelitbangan daerah yaitu 1) Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 2) Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan; 3) Program Prioritas Bidang Ekonomi; 4) Program Prioritas Bidang Infrastruktur; dan 5) Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek.

Selengkapnya, sinergitas keterkaitan antara Prioritas Nasional, Visi Misi Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Sinergitas Prioritas Nasional, Visi Misi Kabupaten Batang dan Agenda Strategis Kelitbangan Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

Nawacita/ Prioritas Nasional	Visi Batang Tahun 2017- 2022	Misi Batang Tahun 2017-2022	Kebutuhan Masyarakat	Agenda Strategis	Tahun Pelaksanaan	Sumber dan Besaran Anggaran
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	Batang yang Tenteram	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur	Masih minimnya pembinaan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur di Kabupaten Batang dalam rangka mendukung peningkatan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah)	Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	2017-2022	11.584.904.000
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,	Batang yang Harmonis	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis <i>e government</i> didukung pengembangan kerjasama	Masih kurangnya pemanfaatan teknologi infomasi (<i>E-Government</i>) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang sebagai langkah meningkatkan tata kelola pemerintahan	Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2017-2022	8.123.653.000

Nawacita/ Prioritas Nasional	Visi Batang Tahun 2017- 2022	Misi Batang Tahun 2017-2022	Kebutuhan Masyarakat	Agenda Strategis	Tahun Pelaksanaan	Sumber dan Besaran Anggaran
dan terpercaya			yang baik (<i>good governance</i>), pelayanan publik dan penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi			
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis <i>e government</i> didukung pengembangan kerjasama	Masih lemahnya budaya inovasi dalam berbagai sektor utamanya pengembangan dan pelaksanaan sistem inovasi daerah (SIDa) secara bertahap dan terencana	Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek	2017-2022	9.097.484.000
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara	Batang yang Berdaya Saing	Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batang yang mendukung aksesibilitas masyarakat dan menunjang berjalannya pengembangan	Program Prioritas Bidang Infrastruktur	2017-2022	5.468.614.000

Nawacita/ Prioritas Nasional	Visi Batang Tahun 2017- 2022	Misi Batang Tahun 2017-2022	Kebutuhan Masyarakat	Agenda Strategis	Tahun Pelaksanaan	Sumber dan Besaran Anggaran
kesatuan.			perekonomian yang berkelanjutan			
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Batang yang Tenteram	Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur	Masih rendahnya kepastian hukum di kalangan masyarakat	Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	2017-2022	11.584.904.000
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Batang yang Energik	Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu	Masih rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Batang ditunjukkan dengan angka IPM pada tahun 2016 yang baru mencapai 66,38	Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	2017-2022	11.584.904.000
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar	Batang yang Berdaya Saing	Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur	Belum optimalnya peran serta pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung	Program Prioritas Bidang Ekonomi	2017-2022	10.685.525.000

Nawacita/ Prioritas Nasional	Visi Batang Tahun 2017- 2022	Misi Batang Tahun 2017-2022	Kebutuhan Masyarakat	Agenda Strategis	Tahun Pelaksanaan	Sumber dan Besaran Anggaran
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya		dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan	pengelolaan potensi lokal daerah melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu			
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Batang yang Berdaya Saing	Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan	Masih kurangnya peran pemerintah dalam mendorong tumbuhnya industri kreatif di Kabupaten Batang	Program Prioritas Bidang Ekonomi	2017-2022	10.685.525.000
Melakukan revolusi karakter bangsa.	Batang yang Agamis	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan	Belum optimalnya pendidikan kewarganegaraan di lingkungan sekolah dan keluarga	Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	2017-2022	11.584.904.000

Nawacita/ Prioritas Nasional	Visi Batang Tahun 2017- 2022	Misi Batang Tahun 2017-2022	Kebutuhan Masyarakat	Agenda Strategis	Tahun Pelaksanaan	Sumber dan Besaran Anggaran
		ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur				
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Batang yang Agamis	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan <i>pengamalan ajaran keagamaan</i> dan nilai-nilai budaya luhur	Masih minimnya ruang-ruang dialog antar warga	Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	2017-2022	11.584.904.000

BAB III

AGENDA STRATEGIS KELITBANGAN

III.1. AKTUALISASI AGENDA PRIORITAS KELITBANGAN DAERAH

Aktualisasi agenda prioritas kelitbangan daerah di Kabupaten Batang dirumuskan ke dalam agenda strategis dan strategi dalam mewujudkan pengembangan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Batang, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1. Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Dengan strategi:
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan publik yang prima melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas
 - b. Meningkatkan penyediaan informasi publik yang komprehensif dan *up to date* dengan penerapan teknologi informasi berbasis website.
2. Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
Dengan strategi:
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan fokus pada pelayanan dasar dan pelayanan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak balita. Penguatan dan peningkatan kemitraan dengan dunia usaha, ormas dan LSM untuk berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan
 - b. Peningkatan kualitas, ketersediaan dan aksesibilitas layanan pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal melalui pengembangan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan KB dengan fokus pada pelayanan kontrasepsi bagi penduduk miskin
 - d. Peningkatan minat baca masyarakat dengan fokus pada masyarakat generasi muda dan pelajar
 - e. Peningkatan kapasitas dan pembinaan bagi pelaku UMKM yang produktif dengan fokus pada pemberian akses permodalan dan peningkatan kualitas dan pemasaran produk yang dihasilkan.

3. Program Prioritas Bidang Ekonomi

Dengan strategi:

1. Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan promosi investasi dengan fokus pada penetapan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan dalam penanaman modal dan investasi.
2. Peningkatan produktivitas pertanian dengan fokus pada pemberian subsidi dan bantuan sarana prasarana pertanian yang dibutuhkan, pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna
3. Peningkatan dan fasilitasi pengembangan jaringan dan produk unggulan Batang.

4. Program Prioritas Bidang Infrastruktur

Dengan strategi:

1. Meningkatkan pengembangan kawasan industri dan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku dan penggunaan teknologi produksi industri
2. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana investasi
3. Peningkatan dukungan penyediaan sarana perdagangan

5. Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek

Dengan strategi:

- a. Penguatan dan pembudayaan inovasi dalam berbagai sektor utamanya pengembangan dan pelaksanaan sistem inovasi daerah(SIDa) secara bertahap dan terencana
- b. Penyediaan data dan informasi yang komprehensif, mutakhir dan up to date yang dapat menunjang akselerasi pembangunan di Batang
- c. Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) melalui perencanaan dan pengembangan TIK dengan lebih terencana dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Batang.

Selengkapnya, sinergitas Agenda Strategis, dan Program Prioritas Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Sinergitas Agenda Strategis, dan Program Prioritas Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

Agenda Strategis	Strategi	Program Prioritas
Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan publik yang prima melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas 2. Meningkatkan penyediaan informasi publik yang komprehensif dan <i>up to date</i> dengan penerapan teknologi informasi berbasis website 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah 2. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 5. Program Pengembangan Pelayanan Publik 6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan fokus pada pelayanan dasar dan pelayanan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak balita. Penguatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Non Formal 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 6. Program Pengembangan Nilai Budaya 7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Agenda Strategis	Strategi	Program Prioritas
	<p>dan peningkatan kemitraan dengan dunia usaha, ormas dan LSM untuk berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan</p> <p>2. Peningkatan kualitas, ketersediaan dan aksesibilitas layanan pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal melalui pengembangan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>3. Peningkatan kualitas pelayanan KB dengan fokus pada pelayanan kontrasepsi bagi penduduk miskin</p> <p>4. Peningkatan minat baca masyarakat dengan fokus pada masyarakat generasi muda dan pelajar</p>	<p>8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</p> <p>10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular</p> <p>11. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>12. Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial</p> <p>13. Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial</p> <p>14. Program Pengembangan Potensi Kelembagaan dan Restorasi Sosial</p> <p>15. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>16. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan</p> <p>17. Program Keluarga Berencana</p> <p>18. Program Kesehatan Reproduksi Remaja</p> <p>19. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</p>

Agenda Strategis	Strategi	Program Prioritas
	5. Peningkatan kapasitas dan pembinaan bagi pelaku UMKM yang produktif dengan fokus pada pemberian akses permodalan dan peningkatan kualitas dan pemasaran produk yang dihasilkan	20. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Program Prioritas Bidang Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan promosi investasi dengan fokus pada penetapan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan dalam penanaman modal dan investasi. 2. Peningkatan produktivitas pertanian dengan fokus pada pemberian subsidi dan bantuan sarana prasarana pertanian yang dibutuhkan, pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 5. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 7. Program pengembangan perikanan budidaya 8. Program pengembangan perikanan tangkap 9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 10. Program peningkatan produksi hasil peternakan

Agenda Strategis	Strategi	Program Prioritas
	3. Peningkatan dan fasilitasi pengembangan jaringan dan produk unggulan Batang.	11. Program peningkatan ketahanan pangan 12. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 13. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 14. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 15. Program Pemasaran Pariwisata 16. Program Kemitraan Pariwisata
Program Prioritas Bidang Infrastruktur	4. Meningkatkan pengembangan kawasan industri dan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku dan penggunaan teknologi produksi industri 5. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana investasi 6. Peningkatan dukungan penyediaan sarana perdagangan	1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 5. Program Pengembangan Perumahan 6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH 8. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 9. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Agenda Strategis	Strategi	Program Prioritas
Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan pembudayaan inovasi dalam berbagai sektor utamanya pengembangan dan pelaksanaan sistem inovasi daerah(SIDa) secara bertahap dan terencana 2. Penyediaan data dan informasi yang komprehensif, mutakhir dan <i>up to date</i> yang dapat menunjang akselerasi pembangunan di Batang 3. Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) melalui perencanaan dan pengembangan TIK dengan lebih terencana dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Batang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian 2. Program Pengembangan Inovasi Daerah 3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

III.2. PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN DAERAH

Indikasi program prioritas kelitbangan daerah Kabupaten Batang merupakan program prioritas yang dirumuskan sinergis dengan arah kebijakan dan program adalah sebagai berikut:

A. *Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik*, terdiri dari enam program prioritas yang terkait dengan kelitbangan dengan total anggaran selama kurun waktu 2017-2022 sebesar Rp. 8.123.653.000. Dimana pelaksanaan program ini terdiri dari beragam dan lintas perangkat daerah di Kabupaten Batang dengan total jumlah kegiatan sebanyak 16 (enam belas) kegiatan.

Adapun keenam program prioritas terkait dengan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
2. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
5. Program Pengembangan Pelayanan Publik
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

B. *Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan*, terdiri dari dua puluh program prioritas yang terkait dengan kelitbangan dengan total anggaran selama kurun waktu 2017-2022 sebesar Rp. 57.924.520.000. Dimana pelaksanaan program ini terdiri dari beragam dan lintas perangkat daerah di Kabupaten Batang dengan total jumlah kegiatan sebanyak 52 kegiatan.

Adapun kedua puluh program prioritas terkait dengan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
6. Program Pengembangan Nilai Budaya

7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
11. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
12. Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
13. Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial
14. Program Pengembangan Potensi Kelembagaan dan Restorasi Sosial
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
17. Program Keluarga Berencana
18. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
19. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
20. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

C. *Program Prioritas Bidang Ekonomi*, terdiri dari enam belas program prioritas yang terkait dengan kelitbangan dengan total anggaran selama kurun waktu 2017-2022 sebesar Rp. 21.373.050.000. Di mana pelaksanaan program ini terdiri dari beragam dan lintas perangkat daerah di Kabupaten Batang dengan total jumlah kegiatan sebanyak 50 (lima puluh) kegiatan.

Adapun keenam belas program prioritas terkait dengan Bidang Ekonomi sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
5. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
7. Program pengembangan perikanan budidaya
8. Program pengembangan perikanan tangkap

9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
10. Program peningkatan produksi hasil peternakan
11. Program peningkatan ketahanan pangan
12. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
13. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
14. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
15. Program Pemasaran Pariwisata
16. Program Kemitraan Pariwisata

D. *Program Prioritas Bidang Infrastruktur*, terdiri dari sembilan program prioritas yang terkait dengan kelitbangan dengan total anggaran selama kurun waktu 2017-2022 sebesar Rp. 5.468.614.000. Di mana pelaksanaan program ini terdiri dari beragam dan lintas perangkat daerah di Kabupaten Batang dengan total jumlah kegiatan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kegiatan.

Adapun kesembilan program prioritas terkait dengan Bidang Infrastruktur sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
5. Program Pengembangan Perumahan
6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
8. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
9. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

E. *Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek*, terdiri dari tiga program prioritas yang terkait dengan kelitbangan dengan total anggaran selama kurun waktu 2017-2022 sebesar Rp. 9.097.484.000. Di mana pelaksanaan program ini terdiri dari beragam dan lintas perangkat daerah di Kabupaten Batang dengan total jumlah kegiatan sebanyak 19 (Sembilan belas) kegiatan.

Adapun ketiga program prioritas terkait dengan Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian
2. Program Pengembangan Inovasi Daerah
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Selengkapnya, indikasi Program Prioritas Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 yang disertai dengan kegiatan dan anggaran selama tahun perencanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022
(Dalam Ribuan)

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/Outcome/Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
A	Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik								1.382.400	1.601.100	1.791.670	1.669.297	1.679.186		
1	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah								187.000	255.700	351.270	333.897	273.786		
a	Kajian dan Penyusunan Pembangunan/pengembangan SIMPEG	Tersedianya sistem pegawai yang <i>up to date</i> dan relevan	Sistem	1	1	1	1	1	187.000	205.700	226.270	248.897	273.786	BKD	Bapelitbang; Inspektorat
b	Kajian Pengembangan Kerjasama Antar Daerah	Tersedianya kajian pengembangan kerjasama antar daerah	Dokumen	0	1	1	0	0	-	50.000	50.000	-	-	Bagian Humas	Bagian Tapem
c	Pengembangan Sistem Jenjang Karir dan Kompetensi ASN	Tersedianya kajian dan pedoman jenjang karir dan kompetensi ASN	Dokumen	0	0	1	1	0	-	-	75.000	85.000	-	BKD	Bapelitbang; Inspektorat
2	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan								-	-	200.000	-	-		
a	Pengembangan Sistem pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Tersedianya sistem pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Sistem	0	0	1	0	0	-	-	200.000	-	-	Inspektorat	Bag. Organisasi, Bapelitbang
3	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah								50.000	60.000	70.000	80.000	90.000		
a	Pengembangan SIMDA Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya PD dengan sistem komputerisasi pengelolaan SIMDA Keuangan	%	70	80	90	100	100	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	BPKPAD	Semua OPD
4	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								565.400	565.400	565.400	565.400	565.400		
a	Penyusunan Kajian Regulasi Peraturan Daerah (<i>Regulatory Impact Assessment</i>)	Tersedianya kajian regulasi peraturan daerah yang bermanfaat dan berdampak bagi pembangunan dan masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	565.400	565.400	565.400	565.400	565.400	Setwan	Bagian Hukum, Bapelitbang

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/Outcome/ Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
5	Program Pengembangan Pelayanan Publik								260.000	320.000	355.000	390.000	400.000		
a	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	Tersedianya pelayanan administrasi kependudukan yang optimal pada setiap desa	Desa	100	120	140	150	160	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	Disdukcapil	Organisasi; Bapelitbang
b	Kajian Suvey Kepuasan Masyarakat	Tersedianya dokumen kajian Survei Kepuasan Masyarakat		1	1	1	1	1	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Organisasi	Semua OPD Layanan Publik
c	Batang News Corner	Tersedianya kerjasama dengan lembaga media untuk informasi pembangunan Batang	Paket	1	1	1	1	1	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Humas	Media
d	Penyusunan SPP dan SOP Perangkat Daerah penyedia layanan publik	Tersedianya pedoman SPP dan SOP layanan publik	PD	0	5	10	15	20	-	50.000	75.000	100.000	100.000	Organisasi	Organisasi; OPD penyedia layanan publik
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								320.000	400.000	250.000	300.000	350.000		
a	Penyusunan Masterplan/ Rencana Induk E Government	Tersedianya dokumen kajian Rencana Induk E Government	Dokumen	1	1	0	0	0	50.000	50.000	-	-	-	Diskominfo	Bapelitbang; Tapem, Organisasi
b	Penyusunan Masterplan Integrasi Data Sistem Informasi E Government	Tersedianya dokumen kajian masterplan Sistem Informasi Data E Government	Dokumen	1	1	0	0	0	100.000	150.000	-	-	-	Diskominfo	Bapelitbang; Tapem, Organisasi
c	Perencanaan masterplan jaringan fiber optic	Tersedianya dokumen masterplan jaringan fiber optic	Dokumen	1	0	0	0	0	20.000	-	-	-	-	Diskominfo	Bapelitbang; Tapem, Organisasi
d	Perencanaan Pengembangan Smart Village	Meningkatnya jumlah desa yang menjadi Smart Village	%	30	40	50	60	70	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	Diskominfo	Dispermades
B	Program Prioritas Bidang Sosial dan Masyarakat								12.160.000	13.015.740	12.757.840	13.289.000	6.701.940		
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini								60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
a	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya data Pokok PAUD	Dokumen	1	1	1	1	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	DisdikBud	Diskominfo; BPS

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/Outcome/ Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
b	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Tersedianya umen pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Dokumen	1	1	1	1	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	DisdikBud	Dinas PPPA; PP dan KB
2	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								550.000	550.000	550.000	550.000	550.000		
a	Pengembangan sekolah satu atap	Jumlah sekolah satu atap yang difasilitasi	Sekolah	3	3	3	3	3	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	DisdikBud	Dinas PUPR
b	pengembangan sekolah berkeunggulan lokal	Jumlah satuan pendidikan dasar yang dikembangkan berkeunggulan lokal	SD	4	4	4	4	4	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	DisdikBud	Dinas PUPR
3	Program Pendidikan Non Formal								25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
a	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Terselenggaranya pembinaan lembaga yang mengembangkan pendidikan keaksaraan	kegiatan	1	1	1	1	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	DisdikBud	Dispurasip; Dinparpora; DP3AP2KB
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								6.763.000	7.610.740	7.352.840	7.884.000	1.296.940		
a	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Terselenggaranya pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan guru	kegiatan	-	1	-	1	-	-	500.000	-	250.000	-	DisdikBud	BKD
b	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang SD	Jumlah guru yang menerima manfaat tambahan penghasilan/ kesejahteraan	Guru	36	40	40	50	50	156.200	173.040	173.040	216.300	216.300	DisdikBud	BKD
c	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang SMP	Jumlah guru yang menerima manfaat tambahan penghasilan/ kesejahteraan	Guru	79	96	100	130	140	341.800	415.300	432.600	562.380	605.640	DisdikBud	BKD
d	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang PAUD	Jumlah guru yang menerima manfaat tambahan penghasilan/ kesejahteraan	Guru	1.391	1.400	1.450	1.475	1.500	5.915.000	6.056.400	6.272.200	6.380.320	6.489.000	DisdikBud	BKD
e	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	terselenggaranya kegiatan Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan	1	1	1	1	1	50.000	66.000	75.000	75.000	75.000	DisdikBud	BKD
f	Bimtek PAKEM Pendidik SD	Jumlah guru yang mengikuti bimtek PAKEM	Guru	456	456	456	456	456	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	DisdikBud	BKD

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/Outcome/ Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya								522.000	530.000	530.000	530.000	530.000		
a	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah peninggalan sejarah, purbakala dan situs yang dipelihara dan dikelola	Buah	320	320	320	320	320	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000	DisdikBud	Dispurasip; Dinparpora
b	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah festival seni yang diselenggarakan	Buah	2	2	2	2	2	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	DisdikBud	Dinparpora
c	Pengembangan database dan sistem informasi kesejarahan.	Tersedianya database dan sistem informasi kesejarahan	Dokumen	1	1	1	1	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	DisdikBud	Diskominfo; BPS
d	Bimtek pengembangan museum daerah	Jumlah pegawai museum yang mengikuti bimtek	Pegawai	20	20	20	20	20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	DisdikBud	Dispurasip; Dinparpora
e	Kajian sejarah dan budaya daerah	Tersedianya umen sejarah dan budaya daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	DisdikBud	Dispurasip; Dinparpora
6	Program Pengembangan Nilai Budaya								700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
a	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah seni dan budaya daerah yang dibina	Buah	565	566	567	568	569	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	DisdikBud	Dinparpora
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
a	Bimtek pengembangan kesehatan lingkungan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti bimtek	Orang	50	50	50	50	50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Dinkes	BKD
b	Pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Terlaksananya kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat	Kegiatan	1	1	1	1	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Dinkes	Dispermasdes
c	Pengembangan SDM kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	Terlaksananya kegiatan pengembangan kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	Kegiatan	1	1	1	1	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Dinkes	BKD
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
a	Pengembangan sistem informasi promkes	Tersedianya sistem informasi promkes	Paket	1	1	1	1	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Dinkes	Diskominfo
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
a	Pengembangan database persebaran wabah penyakit di daerah	Tersedianya database persebaran wabah penyakit di daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Dinkes	Diskominfo; BPS

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbang	Sasaran/Outcome/ Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
b	Kajian epidemiologi wabah penyakit menular	Tersedianya umen kajian epidemiologi wabah penyakit menular	Dokumen	1	1	1	1	1	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Dinkes	Bapelitbang
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular								30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
a	Pengembangan database dan sistem informasi penyakit tidak menular	Tersedianya database dan sistem informasi penyakit tidak menular	Dokumen	1	1	1	1	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Dinkes	Diskominfo; BPS
11	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
a	Evaluasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar	Tersedianya umen evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinsos	Bapelitbang
b	Evaluasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum	Tersedianya umen evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinsos	Bapelitbang
c	Evaluasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus	Tersedianya umen evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinsos	Bapelitbang
d	Evaluasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial Lansia	Tersedianya umen evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial Lansia	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinsos	Bapelitbang
e	Evaluasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik diluar panti dan/atau lembaga	Tersedianya umen evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik diluar panti dan/atau lembaga	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinsos	Bapelitbang
f	Evaluasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas mental dan intelektual diluar panti dan/atau lembaga	Tersedianya umen evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas mental dan intelektual diluar panti dan/atau lembaga	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinsos	Bapelitbang

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/Outcome/ Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
g	Evaluasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga LP, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan diluar panti dan/atau lembaga	Tersedianya umen evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga LP, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan diluar panti dan/atau lembaga	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinsos	Bapelitbang
h	Evaluasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial eks tuna susila diluar panti dan/atau lembaga	Tersedianya umen evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial eks tuna susila diluar panti dan/atau lembaga	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinsos	Bapelitbang
12	Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial								50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
a	Evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan dan jaminan sosial keluarga	Tersedianya umen evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan dan jaminan sosial keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinsos	Bapelitbang
13	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial								300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
a	Survey penduduk miskin Kabupaten Batang	Tersedianya data penduduk miskin Kabupaten Batang	Dokumen	1	1	1	1	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Dinsos	BPS
b	Kajian pemetaan kemiskinan kabupaten Batang	Tersedianya umen pemetaan kemiskinan Kabupaten Batang	Dokumen	1	1	1	1	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Dinsos	Bapelitbang
14	Program Pengembangan Potensi Kelembagaan dan Restorasi Sosial								150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
a	Bimtek Pengembangan kapasitas SDM pendampingan Sosial	Jumlah SDM pendamping sosial yang mengikuti bimtek	Orang	30	30	30	30	30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Dinsos	BKD
15	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
a	Pengembangan database kependudukan dan pencatatan sipil	Tersedianya database kependudukan dan pencatatan sipil	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dindukcapil	Diskominfo; BPS
b	Pengembangan sistem informasi kependudukan berbasis teknologi informasi	Tersedianya sistem informasi kependudukan berbasis IT	Paket	1	1	1	1	1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Dindukcapil	Diskominfo

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbang	Sasaran/Outcome/ Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
16	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan								300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
a	Pengembangan model informasi data terpilah menurut jenis kelamin	Tersedianya informasi data terpilah menurut jenis kelamin tingkat daerah	Paket	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	DP3AP2KB	Diskominfo; BPS
b	Evaluasi kebijakan perlindungan perempuan di kabupaten Batang	Tersedianya umen evaluasi perlindungan perempuan di kabupaten Batang	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	DP3AP2KB	Baperlitbang
c	Kajian partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosbud	Tersedianya umen hasil kajian partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosbud	Dokumen	1	1	1	1	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	DP3AP2KB	Baperlitbang; Dinkes
d	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Tersedianya sistem informasi gender dan anak	Paket	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	DP3AP2KB	Diskominfo; BPS
17	Program Keluarga Berencana								200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
a	Kajian pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Tersedianya umen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Dokumen	1	1	1	1	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	DP3AP2KB	Baperlitbang
b	Pengembangan sistem database dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Tersedianya database dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	DP3AP2KB	Diskominfo; BPS
18	Program Kesehatan Reproduksi Remaja								50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
a	Pengembangan jaringan pelayanan KB dan Kespro	Terlaksananya pengembangan jaringan pelayanan KB dan Kespro	Kegiatan	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	DP3AP2KB	Dinkes
19	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga								200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
a	Pengembangan kualitas ketahanan keluarga	Terlaksananya kegiatan pengembangan kualitas ketahanan keluarga	Kegiatan	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	DP3AP2KB	Dispermasdes
b	Kajian pemetaan potensi ekonomi berbasis keluarga di setiap desa.	Tersedianya umen pemetaan potensi ekonomi berbasis keluarga di setiap desa.	Dokumen	1	1	1	1	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	DP3AP2KB	Dispermasdes; Disperindag dan KUKM

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/Outcome/ Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
20	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan								750.000	750.000	750.000	750.000	750.000		
a	Pengembangan koleksi pustaka	Terlaksananya pengembangan koleksi pustaka	Kegiatan	1	1	1	1	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Dispurasi	Disdikbud
b	Pengembangan pelestarian naskah kuno melalui alih media digital	Terlaksananya Pengembangan pelestarian naskah kuno melalui alih media digital	Kegiatan	1	1	1	1	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Dispurasi	Disdikbud
c	Pengembangan data dan informasi perpustakaan	Terlaksananya Pengembangan data dan informasi perpustakaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Dispurasi	Diskominfo
d	Pengembangan kapasitas pustakawan	Terlaksananya pengembangan kapasitas pustakawan	Kegiatan	1	1	1	1	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Dispurasi	Balai Diklat
e	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Terlaksananya Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Dispurasi	Disdikbud
C	Program Prioritas Bidang Ekonomi								3,890,550	4,378,150	4,310,000	4,351,880	4,442,470		
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								162.550	170.150	187.000	205.880	226.470		
a	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya database tentang pertumbuhan investor baru	Paket	1	1	1	1	1	65.000	68.250	75.000	82.580	90.840	DPMPSTP dan Naker	Diskominfo; BPS
b	Pengkajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi	Tersusunnya dokumen Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi	Paket	1	1	1	1	1	97.550	101.900	112.000	123.300	135.630	DPMPSTP dan Naker	DPMPSTP dan Naker; Bapelitbang
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								750.000	825.000	900.000	975.000	1.050.000		
a	Pengembangan kemitraan antara IKM dan industri besar atau sektor ekonomi lainnya melalui media elektronik atau non elektronik	Tersedianya database kemitraan antara IKM dan industri besar atau sektor ekonomi lainnya	Paket	15	20	25	30	35	75.000	100.000	125.000	150.000	175.000	Disperindagkop dan UKM	Diskominfo; BPS
b	Pengembangan pemasaran dan promosi produk IKM melalui media elektronik	Persentase IKM yang memiliki website	%	60	70	80	90	100	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	Disperindagkop dan UKM	Diskominfo

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbang	Sasaran/Outcome/ Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
c	Pengembangan IKM berbasis ekonomi digital	Terlaksananya kegiatan pelatihan <i>e-commerce</i>	Kegiatan	1	1	1	1	1	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Disperindagkop dan UKM	Diskominfo
d	Kajian diversifikasi produk dan inovasi IKM	Tersedianya dokumen diversifikasi produk dan inovasi IKM	Dokumen	1	1	1	1	1	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Disperindagkop dan UKM	Bapelitbang
3	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi								-	25.000	75.000	-	25.000		
a	Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan terapan bidang industri	Terlaksananya sosialisasi hasil-hasil litbangyasa dalam bidang pencegahan pencemaran industri	Kegiatan	-	1	-	-	1	-	25.000	-	-	25.000	Disperindagkop dan UKM	Bapelitbang; DLH
b	Kajian tentang pengembangan sistem Inovasi Teknologi Industri	Tersusunnya dokumen tentang pengembangan sistem Inovasi Teknologi Industri	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	75.000	-	-	Disperindagkop dan UKM	Bapelitbang
4	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah								455.000	460.000	465.000	470.000	475.000		
a	Pelatihan kewirausahaan dan AMT (<i>Achievement Motivation Training</i>)	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan dan AMT	Kegiatan	1	1	1	1	1	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Disperindagkop dan UKM	Bapelitbang
b	Pengembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda yang memiliki usaha mandiri	%	10	20	30	40	50	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	Disperindagkop dan UKM	Disparpora
c	Pengembangan industri melalui pola karir dan <i>one village one product</i>	Persentase desa yang memiliki produk unggulan (<i>one village one product</i>)	%	100	100	100	100	100	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	Disperindagkop dan UKM	Diskominfo
5	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah								232.000	232.000	232.000	232.000	232.000		
a	Pengembangan klaster bisnis	Terlaksananya kegiatan pengembangan klaster bisnis bagi UMKM	Kegiatan	1	1	1	1	1	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	Disperindagkop dan UKM	-
b	Pengembangan aplikasi teknis usaha simpan pinjam	Terlaksananya kegiatan pengembangan aplikasi teknis usaha simpan pinjam	Sistem	90	90	90	90	90	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	Disperindagkop dan UKM	Diskominfo
c	Pengembangan jaringan kerjasama Usaha koperasi	Terlaksananya kegiatan pengembangan jaringan kerjasama Usaha koperasi	Anggota	150	150	150	150	150	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	Disperindagkop dan UKM	Diskominfo
6	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri								237.000	237.000	237.000	275.000	237.000		

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/Outcome/Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
a	Bimtek pengembangan pasar dan distribusi barang/produk bagi calon eksportir	Terlaksananya kegiatan bimtek pengembangan pasar dan distribusi barang/produk bagi calon eksportir	Kegiatan	1	1	1	1	1	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Disperindagkop dan UKM	DPMPSTP dan Naker
b	Kajian tentang potensi usaha di sektor perdagangan	Tersusunnya dokumen potensi usaha di sektor perdagangan Kabupaten Batang	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	38.000	-	Disperindagkop dan UKM	Bapelitbang
c	Bintek HaKI	Terfasilitasinya kegiatan bintek tentang Hak Kekayaan Intelektual	Kegiatan	3	3	3	3	3	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Disperindagkop dan UKM	Bapelitbang
d	Fasilitasi HaKI	Terfasilitasinya kegiatan tentang Hak Kekayaan Intelektual	Kegiatan	3	3	3	3	3	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	Disperindagkop dan UKM	Bapelitbang
7	Program pengembangan perikanan budidaya								150.000	180.000	150.000	150.000	150.000		
a	Pengembangan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan	Terbentuknya kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan	Paket	1	1	1	1	1	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	Dislutkannak	Disperindagkop dan UKM
b	Bimtek dan pemantauan untuk pengembangan sumberdaya manusia usaha kecil pembudidayaan ikan	Terlaksananya kegiatan bimtek dan pemantauan untuk pengembangan sumberdaya manusia usaha kecil pembudidayaan ikan	Kegiatan	1	1	1	1	1	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Dislutkannak	-
c	Kajian mengenai tata cara pembenihan ikan dan pembesaran ikan	Tersedianya dokumen mengenai tata cara pembenihan ikan dan pembesaran ikan	Dokumen	1	1	1	1	1	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Dislutkannak	Bapelitbang
d	Kajian tata kelola air dan lahan pembudidayaan ikan	Tersusunnya buku kajian mengenai tata kelola air dan lahan pembudidayaan ikan	Dokumen	-	1	-	-	-	-	30.000	-	-	-	Dislutkannak	Bapelitbang; DPU dan PR
8	Program pengembangan perikanan tangkap								152.000	220.000	152.000	220.000	152.000		
a	Pengembangan kelembagaan usaha nelayan kecil	Terbentuknya kelembagaan usaha nelayan kecil	Paket	1	1	1	1	1	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	Dislutkannak	Disperindagkop dan UKM
b	Pengembangan sistem informasi dan penataan sentra nelayan kecil	Terbentuknya sistem informasi dan penataan sentra nelayan kecil	Paket	1	1	1	1	1	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	Dislutkannak	Diskominfo, Disperindagkop dan UKM

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/Outcome/ Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
c	Diseminasi iptek dan informasi nelayan kecil dan pelaku usaha perikanan	Terselenggaranya kegiatan diseminasi iptek dan informasi nelayan kecil dan pelaku usaha perikanan	Kegiatan	-	1	-	1	-	-	68.000	-	68.000	-	Dislutkannak	Diskominfo; Bapelitbang
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak								-	47.000	92.000	-	-		
a	Kajian mengenai pencegahan penularan penyakit zoonosis	Tersusunnya dokumen tentang pencegahan penularan penyakit zoonosis	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	45.000	-	-	Dislutkannak	Bapelitbang
b	Bimtek tentang kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	Terselenggaranya kegiatan bimtek tentang kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	Kegiatan	-	1	1	-	-	-	47.000	47.000	-	-	Dislutkannak	Disperindagkop dan UKM
10	Program peningkatan produksi hasil peternakan								73.000	103.000	108.000	73.000	73.000		
a	Pengembangan unit pengolahan hasil dibidang peternakan	Terbentuknya unit pengolahan hasil dibidang peternakan	Paket	1	1	1	1	1	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	Dislutkannak	Disperindagkop dan UKM
b	Kajian tentang statistik usaha dan pengolahan hasil peternakan	Tersusunnya dokumen statistik usaha dan pengolahan hasil peternakan	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	35.000	-	-	Dislutkannak	Bapelitbang
c	Kajian tentang produksi pangan olahan hasil peternakan	Tersusunnya dokumen produksi pangan olahan hasil peternakan	Dokumen	-	1	-	-	-	-	30.000	-	-	-	Dislutkannak	Disperindagkop dan UKM
11	Program peningkatan ketahanan pangan								159.000	162.000	185.000	204.000	235.000		
a	Perencanaan penyediaan cadangan, kecukupan dan pemerataan pangan komoditas prioritas	Tersusunnya dokumen perencanaan penyediaan cadangan, kecukupan dan pemerataan pangan komoditas prioritas	Dokumen	1	-	-	-	-	29.000	-	-	-	-	Dispaperta	
b	Pengembangan pola dan sistem distribusi pangan	Terbentuknya pola dan sistem distribusi pangan	Paket	1	1	1	1	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Dispaperta	Disperindagkop dan UKM
c	Pengembangan produksi olahan pangan berbasis sumberdaya dan bahan lokal	Terbentuknya produksi olahan pangan berbasis sumberdaya dan bahan lokal	Paket	1	1	1	1	1	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Dispaperta	Disperindagkop dan UKM
d	Pengembangan penganeekaragaman pangan	Jumlah kecamatan yang melakukan kegiatan diversifikasi pangan	Kecamatan	15	15	15	15	15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Dispaperta	Dispermedes

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbang	Sasaran/Outcome/ Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
e	Pengembangan teknologi pangan lokal bahan pokok alternatif	Terselenggaranya kegiatan Pengembangan teknologi pangan lokal bahan pokok alternatif	Paket	1	1	1	1	1	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Dispaperta	Bapelitbang
f	Pengembangan kelembagaan keamanan pangan dan gizi	Jumlah desa mandiri pangan	Desa	5	12	17	21	28	23.000	55.000	78.000	97.000	128.000	Dispaperta	Dispermades
12	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan								93.000	73.000	93.000	73.000	73.000		
a	Pengembangan kelembagaan petani pemakai air dan petani pemakai air tanah	Terbentuknya pekumpulan petani pemakai air dan perkumpulan petani pemakai air tanah	Kegiatan	1	-	1	-	-	20.000	-	20.000	-	-	Dispaperta	DPU dan PR
b	Penerapan pedoman perbenihan tanaman	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi perbenihan tanaman	Kegiatan	1	1	1	1	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Dispaperta	Bapelitbang
c	Penerapan paket teknologi tanaman pangan dan hortikultura	Terselenggaranya pelatihan tentang teknologi tanaman pangan dan hortikultura	Paket	1	1	1	1	1	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	Dispaperta	Bapelitbang
13	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan								255.000	197.000	212.000	227.000	242.000		
a	Penerapan pedoman teknis budidaya, peningkatan mutu dan perlakuan tanaman pangan dan hortikultura	Terselenggaranya pelatihan tentang budidaya dan peningkatan mutu tanaman pangan dan hortikultura	Paket	1	1	1	1	1	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	Dispaperta	Bapelitbang
b	Pengembangan bibit unggul pertanian	Terselenggaranya kegiatan pemberian bantuan bibit tanaman hortikultura dan saprodi	Paket	1	1	1	1	1	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	Dispaperta	Bapelitbang
c	Pengembangan kebun agribisnis buah	Jumlah pelatihan tentang pengembangan kebun agribisnis buah	Kegiatan	1	1	1	1	1	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Dispaperta	Bapelitbang
d	Perencanaan usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	Tersusunnya dokumen rencana usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	Dokumen	1	-	-	-	-	73.000	-	-	-	-	Dispaperta	Bapelitbang
e	Pengembangan dan penetapan sentra produksi komoditas hortikultura	Terbentuknya sentra produksi komoditas hortikultura	Desa	3	6	9	12	15	15.000	30.000	45.000	60.000	75.000	Dispaperta	Disperindagkop dan UKM; Dispermades
14	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata								576.000	576.000	576.000	576.000	576.000		

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbang	Sasaran/Outcome/Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
a	Pengembangan obyek pariwisata unggulan	Persentase obyek wisata yang dikembangkan menjadi pariwisata unggulan	%	100	100	100	100	100	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000	Disparpora	DPU dan PR
b	Penerapan standar mutu sarana prasarana wisata	Persentase obyek wisata yang sesuai dengan standar mutu sarana prasarana wisata	%	100	100	100	100	100	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	Disparpora	DPU dan PR
15	Program Pemasaran Pariwisata								556.000	806.000	556.000	556.000	556.000		
a	Pengembangan promosi wisata didalam dan luar negeri	Tertindakannya kegiatan promosi pariwisata didalam dan luar negeri	Paket	1	1	1	1	1	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000	Disparpora	DPMPSTP dan Naker
b	Pengembangan <i>branding</i> dan <i>tagline</i> pariwisata daerah	Terbentuknya <i>branding</i> dan <i>tagline</i> pariwisata daerah	Paket	-	1	-	-	-	-	250.000	-	-	-	Disparpora	DPMPSTP dan Naker
16	Program Kemitraan Pariwisata								40.000	65.000	90.000	115.000	140.000		
a	Pengembangan Kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat	Jumlah desa wisata yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri	Desa	3	6	9	12	15	25.000	50.000	75.000	100.000	125.000	Disparpora	Dispermades
b	Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata	Persentase sentra IKM yang dijadikan destinasi wisata	%	100	100	100	100	100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Disparpora	Disperindagkop dan UKM
D	Program Prioritas Bidang Infrastruktur								889.165	1.253.754	1.358.565	1.006.065	961.065		
1	Program Perencanaan Tata Ruang								76.000	101.000	101.000	76.000	76.000		
a	Kajian tentang standar Sertifikasi Laik Fungsi bangunan gedung	Tersusunnya dokumen standar Sertifikasi Laik Fungsi bangunan gedung	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	25.000	-	-	DPU dan PR	Bapelitbang
b	Kajian tentang penetapan harga satuan bangunan strategis kabupaten	Tersusunnya dokumen tentang penetapan harga satuan bangunan strategis kabupaten	Dokumen	-	1	-	-	-	-	25.000	-	-	-	DPU dan PR	Bapelitbang
c	Pengembangan data dan informasi penataan bangunan dan lingkungan	Tersedianya database tentang penataan bangunan dan lingkungan	Paket	1	1	1	1	1	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	DPU dan PR	Diskominfo
d	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi	Tersedianya database jasa konstruksi	Paket	1	1	1	1	1	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	DPU dan PR	Diskominfo, Bapelitbang
e	Bimtek pengembangan infrastruktur desa dengan sistem swakelola	Terselenggaranya kegiatan bimtek pengembangan infrastruktur desa bidang bangunan gedung	Kegiatan	1	1	1	1	1	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	DPU dan PR	Dispermades

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/Outcome/ Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang								25.000	25.000	85.000	85.000	85.000		
a	Kajian tentang Rencana Detail Tata Ruang	Tersusunnya dokumen daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK)	Dokumen	-	3	3	3	3	-	-	60.000	60.000	60.000	DPU dan PR	Bapelitbang
b	Pengembangan sistem informasi tata ruang daerah	Tersedianya database tentang tata ruang daerah	Paket	1	1	1	1	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	DPU dan PR	Diskominfo, Bapelitbang
3	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya								81.000	81.000	81.000	131.000	81.000		
a	Pengembangan desain pembangunan/peningkatan dan oemeliharaan dalam pengelolaan sumber daya air	Terselenggaranya kegiatan survey investigasi desain pembangunan/peningkatan dan oemeliharaan dalam pengelolaan sumber daya air	Kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	-	50.000	-	DPU dan PR	Bapelitbang
b	Pengembangan data di bidang sumber daya air	Terbentuknya database bidang sumber daya air	Paket	1	1	1	1	1	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	DPU dan PR	Diskominfo; Bapelitbang
c	Pelaksanaan studi kelayakan dampak lingkungan	Tersusunnya dokumen studi kelayakan dampak lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	DPU dan PR	DLH
d	Pengembangan sistem informasi dan pendataan sumber daya air pada wilayah sungai	Terbentuknya database sumber daya air pada wilayah sungai	Paket	1	1	1	1	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	DPU dan PR	Diskominfo; Bapelitbang
4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya								51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
a	Pengembangan sistem informasi dan pendataan jaringan irigasi	Terbentuknya database jaringan irigasi pada wilayah sungai	Paket	1	1	1	1	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	DPU dan PR	Diskominfo; Bapelitbang
b	Pengembangan inventarisasi kerusakan jaringan irigasi dan drainase	Terbentuknya database kerusakan jaringan irigasi dan drainase yang terhubung langsung dengan sungai	Paket	1	1	1	1	1	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	DPU dan PR	Diskominfo; Bapelitbang
5	Program Pengembangan Perumahan								-	250.000	380.000	-	-		

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/Outcome/ Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
a	Pengembangan teknologi rancang bangun perumahan ramah lingkungan	Terbentuknya dokumen tentang teknologi rancang bangun perumahan ramah lingkungan	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	380.000	-	-	DPRKP	Bapelitbang
b	Perencanaan dan perancangan rumah layak huni	Terbentuknya dokumen Perencanaan rumah layak huni dalam konsep hunian berimbang	Dokumen	-	1	-	-	-	-	250.000	-	-	-	DPRKP	Bapelitbang
6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi								81.000	81.000	81.000	81.000	81.000		
a	Pengembangan data dan informasi sumberdaya alam	Terbentuknya inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam	Paket	1	1	1	1	1	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	DLH	Diskominfo; Bapelitbang
b	Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat	Terbentuknya sistem pengaduan masyarakat tentang usaha dan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Paket	1	1	1	1	1	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	DLH	Diskominfo
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH								280.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
a	Pengkajian dokumen tentang lingkungan hidup	Tersusunnya dokumen tentang lingkungan hidup	Paket	1	1	1	1	1	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	DLH	Semua OPD
b	Pengkajian tentang inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Tersusunnya dokumen tentang inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Paket	1	1	1	1	1	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	DLH	Diskominfo; Bapelitbang
c	Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati	Terbentuknya database tentang keanekaragaman hayati	Paket	1	1	1	1	1	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	DLH	Diskominfo; Bapelitbang
d	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Terbentuknya kelembagaan TPS 3R berbasis masyarakat	Paket	1	1	1	1	1	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	DLH	Disperindagkop dan UKM
e	Bimtek tentang penggunaan bahan baku produksi dan kemasan ramah lingkungan	Terselenggaranya kegiatan bimtek penggunaan bahan baku produksi dan kemasan ramah lingkungan	Kegiatan	1	1	1	1	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	DLH	Disperindagkop dan UKM
8	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan								123.785	125.685	128.185	130.685	135.685		

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/Outcome/ Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
a	Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat	Terseenggaranya kegiatan pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan	Kegiatan	90	90	90	90	90	90.685	90.685	90.685	90.685	90.685	Dispermades	Disperindagkop dan UKM
b	Pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan	Terbentuknya kelembagaan BUMdes	Desa	4	6	8	10	12	33.100	35.000	37.500	40.000	45.000	Dispermades	Disperindagkop dan UKM
9	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas								171.380	259.069	171.380	171.380	171.380		
a	Pengkajian rencana umum jaringan trayek	Tersusunnya dokumen tentang rencana umum jaringan trayek secara berkala	Dokumen	1	1	1	1	1	66.380	66.380	66.380	66.380	66.380	Dinhub	-
b	Pengkajian rencana induk kepelabuhan	Tersusunnya dokumen tentang rencana induk kepelabuhan	Dokumen	-	1	-	-	-	-	87.689	-	-	-	Dinhub	-
c	Pengembangan database kendaraan tidak bermotor	Terlaksananya kegiatan survei dan pendataan kendaraan tidak bermotor	Kegiatan	1	1	1	1	1	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Dinhub	Satlantas Polres Kab. Batang
d	Bimtek etika budaya lalu lintas	Terlaksananya kegiatan bimtek etika budaya lalu lintas	Kegiatan	1	1	1	1	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Dinhub	Satlantas Polres Kab. Batang
D	Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek								1.669.000	1.709.430	1.532.800	1.574.120	1.612.134		
1	Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian								893.000	918.000	705.000	735.000	765.000		
a	Fasilitasi kegiatan riset daerah	Terfasilitasinya kegiatan riset daerah	Kegiatan	2	3	4	5	6	57.000	67.000	74.000	89.000	111.000	Bapelitbang	-
b	Pengkajian peraturan perundang-undangan tentang kelitbangan	Tersusunnya kajian Peraturan Perundang-undangan tentang kelitbangan	Paket	1	1	1	1	1	119.000	124.000	125.000	130.000	133.000	Bapelitbang	-
c	Mapping Isu Strategis Kabupaten	Tersedianya dokumen Mapping isu Strategis Kabupaten	Dokumen	1	1	1	1	1	60.000	69.000	73.000	78.000	82.000	Bapelitbang	Semua OPD
d	Kajian Regulatory Impact Assesment (RIA) Kebijakan	Tersedianya Dokumen Kajian Regulatory Impact Assesment (RIA) Kebijakan	Paket	1	1	1	1	1	119.000	120.000	130.000	135.000	136.000	Bapelitbang	Bagian Hukum
e	Penyusunan Agenda Riset Daerah	Dokumen agenda riset daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	Bapelitbang	Semua OPD

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/Outcome/ Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
f	Bintek Pengelolaan Jurnal Ilmiah	Jumlah SDM yang mengikuti Bintek Pengelolaan Jurnal Ilmiah	Orang	50	50	50	50	50	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	Bapelitbang	-
g	Kajian Pengembangan Sekolah Pertanian Peternakan	Tersedianya dokumen Kajian Pengembangan Sekolah Pertanian yang berkerjasama dengan Universitas	Dokumen	1	1	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	Bapelitbang	
h	Pengembangan Tim Kelitbangan Daerah	Terbentuknya Tim Kelitbangan Daerah	Regulasi	1	1	1	1	1	85.000	85.000	0	0	0	Bapelitbang	
i	Pengembangan Pedoman Kelitbangan Daerah	terbentuknya pedoman kelitbangan daerah/RIK	Dokumen	1	1	1	1	1	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Bapelitbang	
j	Pengembangan Standar Mutu Kelitbangan Daerah	Tersusunya SOP Kelitbangan Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Bapelitbang	
2	Program Pengembangan Inovasi Daerah								579.000	579.000	609.000	609.000	609.000		
a	Analisis Kebutuhan Riset Terapan Daerah	Tersedianya dokumen analisis kebutuhan Riset Daerah	Paket	1	1	1	1	1	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	Bapelitbang	-
b	Pengembangan Desa Abdimas	Persentase peningkatan desa abdimas	Desa	2	2	3	3	3	80.000	80.000	110.000	110.000	110.000	Bapelitbang	-
c	Monitoring & Evaluasi SIDA	Tersedianya Dokumen Evaluasi SIDA	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Bapelitbang	-
d	Fasilitasi Krenova, Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana, Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Peserta/Partisipan Lomba Krenova tk.Kabupaten Jumlah pemenang krenova tk Provinsi	Paket	1	1	1	1	1	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Bapelitbang	-
e	Lomba Krenova	Terlaksananya kegiatan lomba krenova tingkat kabupaten	Kegiatan	2	2	2	2	2	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Bapelitbang	-
f	Seminar Nasional Hasil Riset Daerah/Diseminasi Hasil Penelitian	Terlaksananya kegiatan seminar nasional	Kegiatan	2	2	2	2	2	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Bapelitbang	-
g	Pengembangan Sekolah Pertanian Peternakan	Tersedianya sekolah pertanian/peternakan	Sekolah	1	1	1	1	1	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Bapelitbang	
3	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								397.000	412.430	418.800	430.120	438.134		
a	Analisis Isi Pemberitaan Media Massa	Tersedianya Dokumen Analisis Isi Pemberitaan media Massa	Paket	1	1	1	1	1	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	Diskominfo	Bapelitbang

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/Outcome/ Indikator	Satuan	Target					Rencana Pembiayaan (Rp.) 000					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
				b	pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Kelompok	41	50	55	60	65	210.000		
c	Pembuatan Web, Newsletter, Bulletin	Tersedianya web, bulletin dan Newsletter	Paket	1	1	1	1	1	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Diskominfo	Bapelitbang

III.3. STRATEGI PELAKSANAAN

Strategi Pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kabupaten Batang dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu Swakelola, Kerjasama Operasional dan Kolaborasi. Penjelasan ketiga kategori tersebut adalah :

1. Swakelola

Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Dinas/ Instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Dari definisi di atas diperoleh 3 tipe Swakelola, yaitu:

- a. Swakelola oleh Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi sebagai penanggung jawab anggaran
- b. Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain (IPL)
- c. Swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Swakelola tipe A dipilih apabila pekerjaan yang akan di swakelola merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi yang bersangkutan. Contoh; Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan swakelola pemeliharaan jalan, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan penyuluhan bagi bidan desa, dan sebagainya.

Swakelola tipe B dipilih apabila ada Instansi Pemerintah Lain (IPL) yang secara keahlian/kompetensi teknis lebih menguasai dari pada satker kita berada. Contoh; Bappeda bekerjasama dengan BPS (Biro Pusat Statistik) untuk pekerjaan Daerah Dalam Angka (BPS lebih ahli dalam masalah angka), Kajian pengembangan Wisata Agro di kota B dengan Universitas Diponegoro (Universitas lebih ahli tentang pertanian/agro daripada Dinas Pertanian atau Pariwisata), dan sebagainya.

Swakelola tipe C dipilih apabila dalam pekerjaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya. Contoh: Perbaikan Saluran Air di desa, Pemeliharaan Jamban/MCK, dan pekerjaan sederhana lainnya.

2. Kerjasama Operasional

Kerjasama Operasional (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan

aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dengan menanggung keuntungan dan kerugian secara bersama.

Sebutan pihak yang terkait dalam Kerjasama Operasional adalah sebagai berikut;

- a. Pemilik Aset adalah pihak yang memiliki aset atau hak penyelenggaraan usaha tertentu yang dipakai sebagai obyek atau sarana Kerjasama Operasi. Misalnya orang yang memiliki tanah untuk dibangun gedung perkantoran di atasnya dalam perjanjian KSO.
- b. Investor adalah pihak yang menyediakan dana, baik seluruh atau sebagian, untuk memungkinkan aset atau hak usaha pemilik aset diberdayakan atau dimanfaatkan dalam KSO.

Pada dasarnya Kerjasama Operasional (KSO) dapat terbagi menjadi dua tipe yaitu Administrative dan Non-Administrative.

- a. Kerjasama Operasional (KSO) Administratif

Tipe Kerjasama Operasional (KSO) ini sering juga disebut sebagai Kerja Sama Operasional di mana kontrak dengan pihak pemberi kerja atau *Project Owner* ditandatangani atas nama Kerjasama Operasional. Tanggungjawab pekerjaan terhadap pemilik proyek berada pada entitas Kerjasama Operasional, bukan pada masing-masing anggota Kerjasama Operasional. Masalah pembagian modal kerja atau pembiayaan proyek, pengadaan peralatan, tenaga kerja, biaya bersama (*joint cost*) serta pembagian hasil (*profit sharing*) sehubungan dengan pelaksanaan proyek didasarkan pada porsi pekerjaan (*scope of work*) masing-masing yang disepakati dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Operasional (*Joint Operation Agreement*).

- b. Kerjasama Operasional (KSO) Non-Administratif

Kerjasama Operasional (KSO) dengan tipe ini dalam prakteknya di kalangan pengusaha jasa konstruksi sering disebut sebagai Konsorsium di mana kontrak dengan pihak *Project Owner* di buat langsung atas nama masing-masing perusahaan anggota. Dalam hal ini Kerjasama Operasional (KSO) hanya bersifat sebagai alat koordinasi. Tanggung jawab pekerjaan terhadap *Project Owner* berada pada masing-masing anggota.

3. Kolaborasi

Istilah kolaborasi biasanya digunakan untuk menjelaskan praktik dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dan melibatkan proses kerja masing-masing maupun kerja bersama dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Motivasi utamanya biasanya adalah memperoleh hasil-hasil kolektif yang tidak mungkin dicapai jika masing-masing pihak bekerja sendiri-sendiri. Selain seperti dalam kerjasama, para pihak berkolaborasi biasanya dengan harapan mendapatkan hasil-hasil yang inovatif, terobosan, dan/atau istimewa/luar biasa, serta prestasi kolektif yang memuaskan. Kolaborasi biasanya dilakukan agar memungkinkan muncul atau berkembangnya saling pengertian dan realisasi visi bersama dalam lingkungan dan sistem yang kompleks.

Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. Konsep kolaborasi didefinisikan juga digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan pihak tertentu. Sekian banyak pengertian dikemukakan dengan sudut pandang beragam namun didasari prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Namun demikian kolaborasi sulit didefinisikan untuk menggambarkan apa yang sebenarnya yang menjadi esensi dari kegiatan ini.

BAB IV

SUPERVISI, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan (untuk mendapatkan kualitas dan manfaat harus dilakukan supervisi melalui edukasi dan pendampingan, sedangkan evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif), selengkapnya Contoh Form Pelaporan Aktualisasi Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Contoh Form Pelaporan Aktualisasi Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2017-2022

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Penanggung jawab	Capaian/Keluaran	Kendala/Tantangan	Penerima Manfaat	Keterangan
A	Swakelola						
1	Kajian Pengembangan Kerjasama Antar Daerah	100.000	Humas	Tersedianya kajian pengembangan kerjasama antar daerah			
2	Pengembangan Sistem Jenjang Karir dan Kompetensi ASN	160.000	BKD	Tersedianya kajian dan pedoman jenjang karir dan kompetensi ASN			
3	Pengembangan Sistem pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	200.000	Inspektorat	Tersedianya sistem pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja			
4	Penyusunan Kajian Regulasi Peraturan Daerah (<i>Regulatory Impact Assesment</i>)	2.827.000	Setwan	Tersedianya kajian regulasi peraturan daerah yang bermanfaat dan berdampak bagi pembangunan dan masyarakat			
5	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	850.000	Disdukcapil	Tersedianya pelayanan administrasi kependudukan yang optimal pada setiap desa			
6	Kajian Suvey Kepuasan Masyarakat	325.000	Bag. Organisasi	Tersedianya dokumen kajian Survei Kepuasan Masyarakat			
7	Penyusunan SPP dan SOP Perangkat Daerah penyedia layanan publik	325.000	Bag. Organisasi	Tersedianya pedoman SPP dan SOP layanan publik			
8	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini	150.000	DisdikBud	Tersedianya data Pokok PAUD			
9	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	150.000	DisdikBud	Tersedianya dokumen pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini			
10	Pengembangan sekolah satu atap	750.000	DisdikBud	Jumlah sekolah satu atap yang difasiltiasi			

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Penanggung jawab	Capaian/Keluaran	Kendala/Tantangan	Penerima Manfaat	Keterangan
11	pengembangan sekolah berkeunggulan lokal	2.000.000	DisdikBud	Jumlah satuan pendidikan dasar yang dikembangkan berkeunggulan lokal			
12	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	125.000	DisdikBud	Terselenggaranya pembinaan lembaga yang mengembangkan pendidikan keaksaraan			
13	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	750.000	DisdikBud	Terselenggaranya pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan guru			
14	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang SD	934.880	DisdikBud	Jumlah guru yang menerima manfaat tambahan penghasilan/ kesejahteraan			
15	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang SMP	2.357.720	DisdikBud	Jumlah guru yang menerima manfaat tambahan penghasilan/ kesejahteraan			
16	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang PAUD	24.623.920	DisdikBud	Jumlah guru yang menerima manfaat tambahan penghasilan/ kesejahteraan			
17	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	341.000	DisdikBud	terselenggaranya kegiatan Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan			
18	Bimtek PAKEM Pendidik SD	1.900.000	DisdikBud	Jumlah guru yang mengikuti bimtek PAKEM			
19	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	742.000	DisdikBud	Jumlah peninggalan sejarah, purbakala dan situs yang dipelihara dan dikelola			
20	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	1.350.000	DisdikBud	Jumlah festival seni yang diselenggarakan			

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Penanggung jawab	Capaian/Keluaran	Kendala/Tantangan	Penerima Manfaat	Keterangan
21	Pengembangan database dan sistem informasi kesejarahan.	150.000	DisdikBud	Tersedianya database dan sistem informasi kesejarahan			
22	Bimtek pengembangan museum daerah	250.000	DisdikBud	Jumlah pegawai museum yang mengikuti bimtek			
23	Kajian sejarah dan budaya daerah	150.000	DisdikBud	Tersedianya umen sejarah dan budaya daerah			
24	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	3.500.000	DisdikBud	Jumlah seni dan budaya daerah yang dibina			
25	Bimtek pengembangan kesehatan lingkungan	1.500.000	Dinkes	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti bimtek			
26	Pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	750.000	Dinkes	Terlaksananya kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat			
27	Pengembangan SDM kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	750.000	Dinkes	Terlaksananya kegiatan pengembangan kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan			
28	Pengembangan sistem informasi promkes	150.000	Dinkes	Tersedianya sistem informasi promkes			
29	Pengembangan database persebaran wabah penyakit di daerah	150.000	Dinkes	Tersedianya database persebaran wabah penyakit di daerah			
30	Pengembangan database dan sistem informasi penyakit tidak menular	150.000	Dinkes	Tersedianya database dan sistem informasi penyakit tidak menular			
31	Evaluasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar	250.000	Dinsos	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar			
32	Evaluasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum	250.000	Dinsos	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum			

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Penanggung jawab	Capaian/Keluaran	Kendala/Tantangan	Penerima Manfaat	Keterangan
33	Evaluasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus	250.000	Dinsos	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus			
34	Evaluasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial Lansia	250.000	Dinsos	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial Lansia			
35	Evaluasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik diluar panti dan/atau lembaga	250.000	Dinsos	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik diluar panti dan/atau lembaga			
36	Evaluasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas mental dan intelektual diluar panti dan/atau lembaga	250.000	Dinsos	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas mental dan intelektual diluar panti dan/atau lembaga			
37	Evaluasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga LP, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan diluar panti dan/atau lembaga	250.000	Dinsos	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga LP, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan diluar panti dan/atau lembaga			
38	Evaluasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial eks tuna susila diluar panti dan/atau lembaga	250.000	Dinsos	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial eks tuna susila diluar panti dan/atau lembaga			
39	Bimtek Pengembangan kapasitas SDM pendampingan Sosial	750.000	Dinsos	Jumlah SDM pendamping sosial yang mengikuti bimtek			
40	Pengembangan database kependudukan dan pencatatan sipil	250.000	Disdukcapil	Tersedianya database kependudukan dan pencatatan sipil			

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Penanggung jawab	Capaian/Keluaran	Kendala/Tantangan	Penerima Manfaat	Keterangan
41	Pengembangan sistem informasi kependudukan berbasis teknologi informasi	500.000	Disdukcapil	Tersedianya sistem informasi kependudukan berbasis IT			
42	Pengembangan model informasi data terpilah menurut jenis kelamin	250.000	Dinas PPPA, PP dan KB	Tersedianya informasi data terpilah menurut jenis kelamin tingkat daerah			
43	Evaluasi kebijakan perlindungan perempuan di kabupaten Batang	250.000	Dinas PPPA, PP dan KB	Tersedianya umen evaluasi perlindungan perempuan di kabupaten Batang			
44	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	250.000	Dinas PPPA, PP dan KB	Tersedianya sistem informasi gender dan anak			
45	Pengembangan sistem database dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	250.000	Dinas PPPA, PP dan KB	Tersedianya database dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk			
46	Pengembangan jaringan pelayanan KB dan Kespro	250.000	Dinas PPPA, PP dan KB	Terlaksananya pengembangan jaringan pelayanan KB dan Kespro			
47	Pengembangan kualitas ketahanan keluarga	250.000	Dinas PPPA, PP dan KB	Terlaksananya kegiatan pengembangan kualitas ketahanan keluarga			
48	Pengembangan koleksi pustaka	750.000	Dispurasip	Terlaksananya pengembangan koleksi pustaka			
49	Pengembangan pelestarian naskah kuno melalui alih media digital	750.000	Dispurasip	Terlaksananya Pengembangan pelestarian naskah kuno melalui alih media digital			
50	Pengembangan data dan informasi perpustakaan	750.000	Dispurasip	Terlaksananya Pengembangan data dan informasi perpustakaan			
51	Pengembangan kapasitas pustakawan	750.000	Dispurasip	Terlaksananya pengembangan kapasitas pustakawan			
52	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	750.000	Dispurasip	Terlaksananya Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan			
53	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	381.670	DPMPTSP dan Naker	Tersedianya database tentang pertumbuhan investor baru			

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Penanggung jawab	Capaian/Keluaran	Kendala/Tantangan	Penerima Manfaat	Keterangan
54	Pengembangan kemitraan antara IKM dan industri besar atau sektor ekonomi lainnya melalui media elektronik atau non elektronik	625.000	Disperindagkop dan UKM	Tersedianya database kemitraan antara IKM dan industri besar atau sektor ekonomi lainnya			
55	Pengembangan pemasaran dan promosi produk IKM melalui media elektronik	2.000.000	Disperindagkop dan UKM	Persentase IKM yang memiliki <i>website</i>			
56	Pengembangan IKM berbasis ekonomi digital	625.000	Disperindagkop dan UKM	Terlaksananya kegiatan pelatihan <i>e-commerce</i>			
57	Pelatihan kewirausahaan dan AMT (<i>Achievement Motivation Training</i>)	375.000	Disperindagkop dan UKM	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan dan AMT			
58	Pengembangan industri melalui pola karir dan <i>one village one product</i>	1.800.000	Disperindagkop dan UKM	Persentase desa yang memiliki produk unggulan (<i>one village one product</i>)			
59	Pengembangan klaster bisnis	240.000	Disperindagkop dan UKM	Terlaksananya kegiatan pengembangan klaster bisnis bagi UMKM			
60	Pengembangan aplikasi teknis usaha simpan pinjam	440.000	Disperindagkop dan UKM	Terlaksananya kegiatan pengembangan aplikasi teknis usaha simpan pinjam			
61	Pengembangan jaringan kerjasama Usaha koperasi	480.000	Disperindagkop dan UKM	Terlaksananya kegiatan pengembangan jaringan kerjasama Usaha koperasi			
62	Bimtek pengembangan pasar dan distribusi barang/produk bagi calon eksportir	225.000	Disperindagkop dan UKM	Terlaksananya kegiatan bimtek pengembangan pasar dan distribusi barang/produk bagi calon eksportir			
63	Kajian tentang potensi usaha di sektor perdagangan	38.000	Disperindagkop dan UKM	Tersusunnya dokumen potensi usaha di sektor perdagangan Kabupaten Batang			
64	Bintek HaKI	550.000	Disperindagkop dan UKM	Terfasilitasinya kegiatan bintek tentang Hak Kekayaan Intelektual			

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Penanggung jawab	Capaian/Keluaran	Kendala/Tantangan	Penerima Manfaat	Keterangan
65	Fasilitasi HaKI	410.000	Disperindagkop dan UKM	Terfasilitasinya kegiatan tentang Hak Kekayaan Intelektual			
66	Pengembangan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan	345.000	Dislutkannak	Terbentuknya kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan			
67	Bimtek dan pemantauan untuk pengembangan sumberdaya manusia usaha kecil pembudidayaan ikan	225.000	Dislutkannak	Terlaksananya kegiatan bimtek dan pemantauan untuk pengembangan sumberdaya manusia usaha kecil pembudidayaan ikan			
68	Kajian mengenai tata cara pembenihan ikan dan pembesaran ikan	180.000	Dislutkannak	Tersedianya dokumen mengenai tata cara pembenihan ikan dan pembesaran ikan			
69	Kajian tata kelola air dan lahan pembudidayaan ikan	30.000	Dislutkannak	Tersusunnya buku kajian mengenai tata kelola air dan lahan pembudidayaan ikan			
70	Pengembangan kelembagaan usaha nelayan kecil	295.000	Dislutkannak	Terbentuknya kelembagaan usaha nelayan kecil			
71	Pengembangan sistem informasi dan penataan sentra nelayan kecil	465.000	Dislutkannak	Terbentuknya sistem informasi dan penataan sentra nelayan kecil			
72	Diseminasi Iptek dan informasi nelayan kecil dan pelaku usaha perikanan	136.000	Dislutkannak	Terselenggaranya kegiatan diseminasi iptek dan informasi nelayan kecil dan pelaku usaha perikanan			
73	Kajian mengenai pencegahan penularan penyakit <i>zoonosis</i>	45.000	Dislutkannak	Tersusunnya dokumen tentang pencegahan penularan penyakit <i>zoonosis</i>			
74	Bimtek tentang kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	94.000	Dislutkannak	Terselenggaranya kegiatan bimtek tentang kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan			
75	Pengembangan unit pengolahan hasil dibidang peternakan	365.000	Dislutkannak	Terbentuknya unit pengolahan hasil dibidang peternakan			

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Penanggung jawab	Capaian/Keluaran	Kendala/Tantangan	Penerima Manfaat	Keterangan
76	Kajian tentang statistik usaha dan pengolahan hasil peternakan	35.000	Dislutkannak	Tersusunnya dokumen statistik usaha dan pengolahan hasil peternakan			
77	Perencanaan penyediaan cadangan, kecukupan dan pemerataan pangan komoditas prioritas	29.000	Dispaperta	Tersusunnya dokumen perencanaan penyediaan cadangan, kecukupan dan pemerataan pangan komoditas prioritas			
78	Pengembangan pola dan sistem distribusi pangan	100.000	Dispaperta	Terbentuknya pola dan sistem distribusi pangan			
79	Pengembangan produksi olahan pangan berbasis sumberdaya dan bahan lokal	130.000	Dispaperta	Terbentuknya produksi olahan pangan berbasis sumberdaya dan bahan lokal			
80	Pengembangan penganekaragaman pangan	175.000	Dispaperta	Jumlah kecamatan yang melakukan kegiatan diversifikasi pangan			
81	Pengembangan kelembagaan keamanan pangan dan gizi	381.000	Dispaperta	Jumlah desa mandiri pangan			
82	Pengembangan kelembagaan petani pemakai air dan petani pemakai air tanah	40.000	Dispaperta	Terbentuknya pekumpulan petani pemakai air dan perkumpulan petani pemakai air tanah			
83	Penerapan pedoman perbenihan tanaman	50.000	Dispaperta	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi perbenihan tanaman			
84	Penerapan paket teknologi tanaman pangan dan hortikultura	315.000	Dispaperta	Terselenggaranya pelatihan tentang teknologi tanaman pangan dan hortikultura			
85	Penerapan pedoman teknis budidaya, peningkatan mutu dan perlakuan tanaman pangan dan hortikultura	330.000	Dispaperta	Terselenggaranya pelatihan tentang budidaya dan peningkatan mutu tanaman pangan dan hortikultura			
86	Pengembangan bibit unggul pertanian	425.000	Dispaperta	Terselenggaranya kegiatan pemberian bantuan bibit tanaman hortikultura dan saprodi			

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Penanggung jawab	Capaian/Keluaran	Kendala/Tantangan	Penerima Manfaat	Keterangan
87	Pengembangan kebun agribisnis buah	80.000	Dispaperta	Jumlah pelatihan tentang pengembangan kebun agribisnis buah			
88	Perencanaan usaha agribisnis tanamana pangan dan hortikultura	73.000	Dispaperta	Tersusnya dokumen rencana usaha agribisnis tanamana pangan dan hortikultura			
89	Pengembangan dan penetapan sentra produksi komoditas hortikultura	225.000	Dispaperta	Terbentuknya sentra produksi komoditas hortikultura			
90	Pengembangan obyek pariwisata unggulan	2.165.000	Disparpora	Persentase obyek wisata yang dikembangkan menjadi pariwisata unggulan			
91	Penerapan standar mutu sarana prasarana wisata	715.000	Disparpora	Persentase obyek wisata yang sesuai dengan standar mutu sarana prasarana wisata			
92	Pengembangan promosi wisata didalam dan luar negeri	2.780.000	Disparpora	Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata didalam dan luar negeri			
93	Pengembangan <i>branding</i> dan <i>tagline</i> pariwisata daerah	250.000	Disparpora	Terbentuknya <i>branding</i> dan <i>tagline</i> pariwisata daerah			
94	Pengembangan Kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat	375.000	Disparpora	Jumlah desa wisata yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri			
95	Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata	75.000	Disparpora	Persentase sentra IKM yang dijadikan destinasi wisata			
96	Kajian tentang standar Sertifikasi Laik Fungsi bangunan gedung	25.000	DPU dan PR	Tersusnya dokumen standar Sertifikasi Laik Fungsi bangunan gedung			
97	Kajian tentang penetapan harga satuan bangunan strategis kabupaten	25.000	DPU dan PR	Tersusnya dokumen tentang penetapan harga satuan bangunan strategis kabupaten			
98	Pengembangan data dan informasi penataan bangunan dan lingkungan	175.000	DPU dan PR	Tersedianya database tentang penataan bangunan dan lingkungan			

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Penanggung jawab	Capaian/Keluaran	Kendala/Tantangan	Penerima Manfaat	Keterangan
99	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi	130.000	DPU dan PR	Tersedianya database jasa konstruksi			
100	Bimtek pengembangan infrastruktur desa dengan sistem swakelola	75.000	DPU dan PR	Terselenggaranya kegiatan bimtek pengembangan infrastruktur desa bidang bangunan gedung			
101	Kajian tentang Rencana Detail Tata Ruang	180.000	DPU dan PR	Tersusunnya dokumen daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK)			
102	Pengembangan sistem informasi tata ruang daerah	125.000	DPU dan PR	Tersedianya database tentang tata ruang daerah			
103	Pengembangan desain pembangunan/peningkatan dan oemeliharaan dalam pengelolaan sumber daya air	50.000	DPU dan PR	Terselenggaranya kegiatan survey investigasi desain pembangunan/peningkatan dan oemeliharaan dalam pengelolaan sumber daya air			
104	Pengembangan data di bidang sumber daya air	130.000	DPU dan PR	Terbentuknya database bidang sumber daya air			
105	Pengembangan sistem informasi dan pendataan sumber daya air pada wilayah sungai	125.000	DPU dan PR	Terbentuknya database sumber daya air pada wilayah sungai			
106	Pengembangan sistem informasi dan pendataan jaringan irigasi pada wilayah sungai	125.000	DPU dan PR	Terbentuknya database jaringan irigasi pada wilayah sungai			
107	Pengembangan inventarisasi kerusakan jaringan irigasi dan drainase	130.000	DPU dan PR	Terbentuknya database kerusakan jaringan irigasi dan drainase yang terhubung langsung dengan sungai			
108	Pengembangan teknologi rancang bangun perumahan ramah lingkungan	380.000	DPRKP	Terbentuknya dokumen tentang teknologi rancang bangun perumahan ramah lingkungan			

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Penanggung jawab	Capaian/Keluaran	Kendala/Tantangan	Penerima Manfaat	Keterangan
109	Perencanaan dan perancangan rumah layak huni	250.000	DPRKP	Terbentuknya dokumen Perencanaan rumah layak huni dalam konsep hunian berimbang			
110	Pengembangan data dan informasi sumberdaya alam	175.000	DLH	Terbentuknya inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam			
111	Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat	230.000	DLH	Terbentuknya sistem pengaduan masyarakat tentang usaha dan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
112	Pengkajian tentang inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	280.000	DLH	Tersusunnya dokumen tentang inventarisasi GRK dan profil emisi GRK			
113	Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati	195.000	DLH	Terbentuknya database tentang keanekaragaman hayati			
114	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	375.000	DLH	Terbentuknya kelembagaan TPS 3R berbasis masyarakat			
115	Bimtek tentang penggunaan bahan baku produksi dan kemasan ramah lingkungan	125.000	DLH	Terselenggaranya kegiatan bimtek penggunaan bahan baku produksi dan kemasan ramah lingkungan			
116	Pengkajian rencana umum jaringan trayek	331.900	Dinhub	Tersusunnya dokumen tentang rencana umum jaringan trayek secara berkala			
117	Pengkajian rencana induk kepelabuhan	87.689	Dinhub	Tersusunnya dokumen tentang rencana induk kepelabuhan			
118	Fasilitasi kegiatan riset daerah	398.000	Bapelitbang	Terfasilitasinya kegiatan riset daerah			
119	Pengkajian peraturan perundang-undangan tentang kelitbangyasa	631.000	Bapelitbang	Tersusunnya kajian Peraturan Perundang-undangan tentang kelitbangyasa			
120	Mapping Isu Strategis Kabupaten	362.000	Bapelitbang	Tersedianya dokumen Mapping isu Strategis Kabupaten			

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Penanggung jawab	Capaian/Keluaran	Kendala/Tantangan	Penerima Manfaat	Keterangan
121	Kajian Regulatory Impact Assesment (RIA) Kebijakan	640.000	Bapelitbang	Tersedianya Dokumen Kajian Regulatory Impact Assesment (RIA) Kebijakan			
122	Penyusunan Agenda Riset Daerah	445.000	Bapelitbang	Dokumen agenda riset daerah			
123	Bintek Pengelolaan Jurnal Ilmiah	370.000	Bapelitbang	Jumlah SDM yang mengikuti Bintek Pengelolaan Jurnal Ilmiah			
124	Analisis Kebutuhan Riset Terapan Daerah	390.000	Bapelitbang	Tersedianya dokumen analisis kebutuhan Riset Daerah			
125	Pengembangan Desa Abdimas	490.000	Bapelitbang	Persentase peningkatan desa abdimas			
126	Monitoring & Evaluasi SIDA	250.000	Bapelitbang	Tersedianya Dokumen Evaluasi SIDA			
127	Fasilitasi Krenova, Fasilitasi DRD, Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana, Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.000	Bapelitbang	Jumlah Peserta/Partisipan Lomba Krenova tk.Kabupaten Jumlah pemenang krenova tk Provinsi			
128	Lomba Krenova	360.000	Bapelitbang	Terlaksananya kegiatan lomba krenova tingkat kabupaten			
129	Seminar Nasional Hasil Riset Daerah	450.000	Bapelitbang	Terlaksananya kegiatan seminar nasional			
130	Analisis Isi Pemberitaan Media Massa	575.000	Bapelitbang	Tersedianya Dokumen Analisis Isi Pemberitaan media Massa			
131	pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	1.161.484	Bapelitbang	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan			
132	Pembuatan Web, Newsletter, Bulletin	360.000	Bapelitbang	Tersedianya web, bulletin dan Newsletter			
133	Kajian Pengembangan Sekolah Pertanian Peternakan	300.000	Bapelitbang	Tersedianya dokumen Kajian Pengembangan Sekolah Pertanian yang berkerjasama dengan Universitas			
134	Pengembangan Tim	170.000	Bapelitbang	Terbentuknya Tim Kelitbang			

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Penanggung jawab	Capaian/Keluaran	Kendala/Tantangan	Penerima Manfaat	Keterangan
	Kelitbangan Daerah			Daerah			
135	Pengembangan Pedoman Kelitbangan Daerah	325.000	Bapelitbang	terbentuknya pedoman kelitbangan daerah			
136	Pengembangan Standar Mutu Kelitbangan Daerah	375.000	Bapelitbang	Tersusunnya SOP Kelitbangan Daerah			
B	Kerjasama dengan Pihak III^{*)}						
1	Kajian dan Penyusunan Pembangunan/pengembangan SIMPEG	1.141.653	BKD	Tersedianya sistem pegawai yang <i>up to date</i> dan relevan			
2	Pengembangan SIMDA Keuangan Perangkat Daerah	350.000	BPKPAD	tersedianya PD dengan sistem komputerisasi pengelolaan SIMDA Keuangan			
3	Batang News Corner	225.000	Humas	Tersedianya kerjasama dengan lembaga media untuk informasi pembangunan Batang			
4	Penyusunan Masterplan/ Rencana Induk <i>E Government</i>	100.000	Diskominfo	Tersedianya dokumen kajian Rencana Induk <i>E Government</i>			
5	Penyusunan Masterplan Integrasi Data Sistem Informasi <i>E Government</i>	250.000	Diskominfo	Tersedianya dokumen kajian masterplan Sistem Informasi Data <i>E Government</i>			
6	Perencanaan masterplan jaringan <i>fiber optic</i>	20.000	Diskominfo	Tersedianya dokumen masterplan jaringan <i>fiber optic</i>			
7	Perencanaan Pengembangan Smart Villlage	1.250.000	Diskominfo	Meningkatnya jumlah desa yang menjadi Smart Villlage			
8	Kajian sejarah dan budaya daerah	150.000	DisdikBud	Tersedianya dokumen sejarah dan budaya daerah			
9	Kajian epidemiologi wabah penyakit menular	1.500.000	Dinkes	Tersedianya dokumen kajian epidemiologi wabah penyakit menular			
10	Evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan dan jaminan sosial keluarga	250.000	Dinsos	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan dan jaminan sosial keluarga			
11	Survey penduduk miskin Kabupaten Batang	750.000	Dinsos	Tersedianya data penduduk miskin Kabupaten Batang			

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Penanggung jawab	Capaian/Keluaran	Kendala/Tantangan	Penerima Manfaat	Keterangan
12	Kajian pemetaan kemiskinan kabupaten Batang	750.000	Dinsos	Tersedianya dokumen pemetaan kemiskinan Kabupaten Batang			
13	Kajian partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosbud	750.000	Dinas PPPA, PP dan KB	Tersedianya dokumen hasil kajian partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosbud			
14	Kajian pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	750.000	Dinas PPPA, PP dan KB	Tersedianya dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk			
15	Kajian pemetaan potensi ekonomi berbasis keluarga di setiap desa.	750.000	Dinas PPPA, PP dan KB	Tersedianya dokumen pemetaan potensi ekonomi berbasis keluarga di setiap desa.			
16	Pengkajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi	570.380	DPMPSTP dan Naker	Tersusunnya dokumen Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi			
17	Kajian diversifikasi produk dan inovasi IKM	1.250.000	Disperindagkop dan UKM	Tersedianya dokumen diversifikasi produk dan inovasi IKM			
18	Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan terapan bidang industri	50.000	Disperindagkop dan UKM	Terlaksananya sosialisasi hasil-hasil litbangyasa dalam bidang pencegahan pencemaran industri			
19	Kajian tentang pengembangan sistem Inovasi Teknologi Industri	75.000	Disperindagkop dan UKM	Tersusunnya dokumen tentang pengembangan sistem Inovasi Teknologi Industri			
20	Pengembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	150.000	Disperindagkop dan UKM	Persentase pemuda yang memiliki usaha mandiri			
21	Kajian tentang produksi pangan olahan hasil peternakan	30.000	Dislutkannak	Tersusunnya dokumen produksi pangan olahan hasil peternakan			
22	Pengembangan teknologi pangan lokal bahan pokok alternatif	130.000	Dispaperta	Terselenggaranya kegiatan Pengembangan teknologi pangan lokal bahan pokok			

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Penanggung jawab	Capaian/Keluaran	Kendala/Tantangan	Penerima Manfaat	Keterangan
				alternatif			
23	Pelaksanaan studi kelayakan dampak lingkungan	150.000	DPU dan PR	Tersusunnya dokumen studi kelayakan dampak lingkungan			
24	Pengkajian dokumen tentang lingkungan hidup	425.000	DLH	Tersusunnya dokumen tentang lingkungan hidup			
25	Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat	453.425	Dispermades	Terselenggaranya kegiatan pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan			
26	Pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan	190.600	Dispermades	Terbentuknya kelembagaan BUMdes			
27	Pengembangan database kendaraan tidak bermotor	375.000	Dinhub	Terlaksananya kegiatan survei dan pendataan kendaraan tidak bermotor			
C	Kolaborasi						
1	Bimtek etika budaya lalu lintas	150.000	Dinhub	Terlaksananya kegiatan bimtek etika budaya lalu lintas			

BAB V PENUTUP

Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Batang.

Program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 diharapkan bisa diterjemahkan kedalam rencana kerja tiap tahunnya oleh pemerintah Kabupaten Batang dan rencana kerja perangkat daerah, sehingga implementasinya dapat terlaksana dengan baik.

Batang,
BUPATI BATANG

WIHAJI

BAB V PENUTUP

Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Batang.

Program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 harapannya bisa diterjemahkan kedalam rencanan kerja tiap tahunnya oleh pemerintah Kabupaten Batang dan rencana kerja perangkat daerah, sehingga implementasinya dapat terlaksana dengan baik.

Batang, 15 Desember 2017

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI